

**RENCANA KERJA  
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	115.CQ	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES</b>				33.190.853.000		
PROVINSI & Kab/Kota	5245	<b>TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA</b>				811.173.000		
	5245.BAH	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	203.930.000		
	5245.BAH.0 01	<b>Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>		1	Layanan	203.930.000		
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	35.655.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Provinsi		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	35.655.000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
kab/kota		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	5	Laporan	56.700.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
kab/kota		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	5	Laporan	75.920.000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	119.330.000		
RPJMN	5245.BDB.0 01	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	119.330.000		
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	119.330.000	34 provinsi +18 satker KIK baru
	5245.BKC	<b>Pemantauan Lembaga</b>		30	Laporan	487.913.000		
	5245.BKC.0 01	<b>Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>		30	Laporan	487.913.000		
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	19.285.000	1 laporan@34 provinsi
Provinsi		202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	157.460.000	laporan semester
Provinsi		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	7	Laporan	5.750.000	
Provinsi		204	Permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	46.660.000	IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11): - laporan triwulan
Provinsi		205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	44.960.000	IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
kab/kota		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	44.625.000	1 laporan@514 KK
kab/kota		302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	5	Laporan	91.508.000	laporan semester
kab/kota		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	5	Laporan	19.250.000	
kab/kota		304	Permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	5	Laporan	19.415.000	IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11): - laporan triwulan
kab/kota		305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	5	Laporan	39.000.000	IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
	6661	<b>PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA</b>				15.149.161.000	<b>Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)</b>	
	6661.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		11	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	14.269.161.000		
	6661.QIC.00 1	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>		6	Lembaga	13.463.686.000		
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	94.595.000	
Provinsi		202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	79.200.000	
Provinsi		203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	413.180.000	
Provinsi		204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	142.560.000	
Provinsi		205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	608.850.000	
Provinsi		206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	79.600.000	
Provinsi		207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	504.500.000	Laporan triwulan kegiatan Kelua dan Seluruh Divisi
Provinsi		208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu	4	Laporan	149.011.000	Laporan triwulan kegiatan Kelua Provinsi
Kabupaten/ Kota		301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	5	Laporan	415.720.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabupaten/ Kota	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	10	Laporan	282.500.000	
Kabupaten/ Kota	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	20	Laporan	2.446.520.000	
Kabupaten/ Kota	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	397.500.000	
Kabupaten/ Kota	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	20	Laporan	2.348.880.000	
Kabupaten/ Kota	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	20	Laporan	286.000.000	
Kabupaten/ Kota	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	20	Laporan	1.769.690.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota
Kabupaten/ Kota	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		20	Laporan	698.520.000	Laporan triwulan kegiatan Ketua Kab/Kota
Kecamatan	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	34	Laporan	1.060.460.000	
Kecamatan	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	34	Laporan	1.686.400.000	Laporan Kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kecamatan
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		5	Laporan	805.475.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Kecamatan	401	Rekrutmen panwasu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	291	Daerah	805.475.000	
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	880.000.000	
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	880.000.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		16	Unit	310.000.000	
Kabupaten/ Kota	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		30	Unit	570.000.000	
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA				359.920.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		6	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	359.920.000	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		6	Laporan	359.920.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	2.400.000	
Kabupaten/ Kota	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	5	Laporan	357.520.000	
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA				10.948.330.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		10	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	10.948.330.000	
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		5	Lembaga	5.794.200.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Kecamatan	401	Honorarium (Kecamatan)		34	Daerah	3.233.400.000	Ketua = 1 org x 6 bln Anggota = 2 org x 6 bln Kasek = 1 org x 6 bln Pelaksana PNS = 2 org x 6 bln Pelaksana Non PNS = 3 org x 6 bln Tenaga pendukung = 2 org x 6 bln
Kelurahan/ Desa	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		291	Orang	2.560.800.000	8 bulan
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		5	Lembaga	5.154.130.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Kabupaten/ Kota	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		5	Lembaga	2.451.660.000	(Ketua + Anggota + Kasek) x 12 bulan
Kabupaten/ Kota	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		5	Lembaga	168.000.000	Sewa Kantor/Ruang Sidang/Gakkumdu = 12 bulan
Kecamatan	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		34	Daerah	1.122.000.000	6 bulan
Kecamatan	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		34	Daerah	0	6 bulan
Kecamatan	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		34	Daerah	1.354.270.000	6 bulan
Kelurahan/ Desa	502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		291	Orang	58.200.000	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN				1.400.445.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		343	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.111.725.000	
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		343	Laporan	1.111.725.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	30.285.000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi		202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	94.740.000	
Provinsi		203 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	18.050.000	
Kabupaten/ Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan	65.800.000	
Kabupaten/ Kota		302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	5	Laporan	299.700.000	
Kabupaten/ Kota		303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan	281.520.000	
Kecamatan		401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	34	Laporan	51.000.000	
Kelurahan/ Desa		501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	291	Laporan	270.630.000	
	6839.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>		6	Perkara, Berkas Perkara	288.720.000	
	6839.QCE.001	<b>Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih</b>		6	Perkara	288.720.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	7.200.000	
Kabupaten/ Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara	281.520.000	
	6840	<b>PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU</b>				1.521.143.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6840.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		18	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	649.193.000	
	6840.QIC.001	<b>Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu</b>		18	Laporan	649.193.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	30.285.000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	93.940.000	
Provinsi		203 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitas sentra gakkumdu	1	Laporan	3.000.000	
Kabupaten/ Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan	21.700.000	
Kabupaten/ Kota		302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	5	Laporan	239.248.000	
Kabupaten/ Kota		303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitas sentra gakkumdu	5	Laporan	261.020.000	
	6840.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>		6	Perkara, Berkas Perkara	871.950.000	
	6840.QCE.001	<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu</b>		6	Perkara	871.950.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	37.350.000	
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	6.000.000	
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	7.200.000	
Kabupaten/ Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara	268.620.000	
Kabupaten/ Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara	296.520.000	
Kabupaten/ Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara	256.260.000	
	6841	<b>PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN</b>				831.681.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6841.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		12	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	553.661.000	
	6841.QIC.001	<b>Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>		12	Laporan	553.661.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	30.321.000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	79.990.000	
Kabupaten/ Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan	263.020.000	
Kabupaten/ Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	5	Laporan	180.330.000	
	6841.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>		6	Perkara, Berkas Perkara	278.020.000	
	6841.QCE.001	<b>Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>		6	Perkara	278.020.000	
		<b>Komponen Input :</b>					

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	6.000.000	
Kabupaten/ Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara	272.020.000	
	6842	<b>PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN</b>				2.169.000.000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6842.QIC	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.569.330.000	
	6842.QIC.00 1	<b>Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>		52	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.569.330.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	30.305.000	
Provinsi		202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	143.115.000	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	18.850.000	
Kabupaten/ Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	5	Laporan	217.090.000	
Kabupaten/ Kota		302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	5	Laporan	474.850.000	
Kabupaten/ Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	5	Laporan	263.520.000	
Kecamatan		401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	34	Laporan	421.600.000	
	6842.QCE	<b>Penanganan Perkara</b>		6	Perkara, Berkas Perkara	599.670.000	
	6842.QCE.0 01	<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR,</b>		6	Perkara	599.670.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	39.150.000	
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	7.200.000	
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	7.200.000	
Kabupaten/ Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	5	Berkas Perkara	34.090.000	
Kabupaten/ Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	5	Perkara	274.770.000	
Kabupaten/ Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Perkara	237.260.000	
	115.WA	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				13.927.599.000	
	6849	<b>PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>				13.089.012.000	
	6849.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		13	Layanan, Laporan, Dokumen	12.200.577.000	
	6849.EBA.9 56	<b>Layanan BMN</b>		1	Layanan	134.977.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	83.685.000	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	5	Laporan	51.292.000	Semesteran
	6849.EBA.9 94	<b>Layanan Perkantoran</b>		12	Layanan	12.065.600.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi/Ka b/kota		001 Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	6	Layanan	5.103.124.000	
Provinsi/Ka b/kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	6	Layanan	6.962.476.000	
	6849.EBB	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>		21	Unit, M2, Paket	232.000.000	
	6849.EBB.9 51	<b>Layanan Sarana Internal</b>		21	Unit	232.000.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	18.000.000	
Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kab/kota		302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	20	Unit	214.000.000	
Kab/kota		303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	
	<b>6849.EBB.9 71</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>0</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
Kab/kota		301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
	<b>6849.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>24</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>	<b>656.435.000</b>	
	<b>6849.EBD.9 52</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>			<b>6</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>	<b>117.425.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	57.165.000	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	5	Dokumen	60.260.000	
	<b>6849.EBD.9 53</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>			<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>109.145.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	57.885.000	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	5	Dokumen	51.260.000	
	<b>6849.EBD.9 55</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>			<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>338.520.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	151.460.000	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	5	Dokumen	187.060.000	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	<b>6849.EBD.9 74</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu</b>			<b>6</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>	<b>91.345.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketelausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketelausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	53.215.000	
Kab/kota		301	Pengelolaan ketelausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketelausahaan dan kearsipan	5	Dokumen	38.130.000	
	<b>6850</b>	<b>PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>					<b>378.820.000</b>	
	<b>6850.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>31</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>	<b>250.085.000</b>	
	<b>6850.EBA.9 57</b>	<b>Layanan Hukum</b>			<b>13</b>	<b>Laporan</b>	<b>105.700.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	33.375.000	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	39.025.000	
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	9.000.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	5	Laporan	12.175.000	
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	5	Laporan	12.125.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	<b>6850.EBA.9 62</b>	<b>Layanan Umum</b>			<b>6</b>	<b>Dokumen</b>	<b>106.785.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	55.525.000	Kegiatan Ketua Provinsi
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		5	Laporan	51.260.000	Kegiatan Ketua Kab/Kota
	<b>6850.EBA.9 69</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>			<b>12</b>	<b>Laporan</b>	<b>37.600.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>						
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	20.000.000	
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	15.600.000	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	5	Laporan	2.000.000	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	<b>6850.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>			<b>184</b>	<b>Orang, Layanan</b>	<b>128.735.000</b>	
	<b>6850.EBC.9 54</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			<b>184</b>	<b>Orang, Layanan</b>	<b>128.735.000</b>	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	54	Orang	59.475.000	Seluruh pegawai provinsi
Kab/kota	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	130	Orang	69.260.000	Seluruh pegawai kabupaten/kota
	4355	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN</b>				115.785.000	
	4355.EBD	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>		6	Dokumen, Layanan, Laporan	115.785.000	
	4355.EBD.9 61	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>		6	Dokumen	115.785.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	55.525.000	
Kab/kota	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	5	Dokumen	60.260.000	
	4356	<b>PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>				343.982.000	
	4356.EBA	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		12	Layanan, Laporan, Dokumen	343.982.000	
	4356.EBA.9 58	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu</b>		6	Laporan	165.265.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	91.335.000	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Kab/kota	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	5	Laporan	73.930.000	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.9 63	<b>Layanan Data dan Informasi</b>		6	Laporan	178.717.000	
		<b>Komponen Input :</b>					
Provinsi	201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	88.457.000	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota
Kab/kota	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	5	Laporan	90.260.000	Semester
<b>TOTAL</b>						<b>47.118.452.000</b>	

Catatan :

- Alokasi anggaran berpedoman pada surat edaran pagu anggaran masing-masing satker;
- Seluruh komponen input perlu di alokasikan anggarannya.

